

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTAENG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
(UIN) Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh :

MUH HASAN  
NIM.10500113109

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Hasan  
Nim : 10500113109  
Tempat/Tgl. Lahir : Bantaeng, 06 Mei 1995  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jalan Kr.Bonto Tangnga VI No 13, Kelurahan Karunrung,  
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.  
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran  
Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gowa, Rabu 07 Juni 2017

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Penyusun,



Muh Hasan

NIM: 10500113109

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng*" yang disusun oleh Muh Hasan, NIM: 10500113109, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 12 Juni 2017 M.  
17 Ramadhan 1438 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.(.....)	
Sekretaris	: Dr. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag. (.....)	
Munaqisy I	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum. (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I. (.....)	
Pembimbing I	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H. (.....)	
Pembimbing II	: Ashabul Kahfi S.Ag., M.H. (.....)	

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah & Hukum,  
UIN Alauddin Makassar



Pro. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP.19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang memberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ilmu , sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng” dapat terselesaikan dengan baik

Salam dan shalawat penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan para Sahabat beliau, dialah nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai pembawa risalah bagi umat manusia, sehingga pada hari kita bisa merasakan indahnya islam dan nikmatnya iman.

Suatu kebanggaan dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis akan berterima kasih kepada mereka yang memberikan doa, usaha dan semangat pada diri penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, semuanya itu akan penulis jadikan bekal untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Penghormatan dan kasih sayang kepada ibuku ST. Bunga Hasan yang senantiasa memberikan perhatian doa dan kasih sayang kepada penulis dan *tetta* ku Kamaruddin Dg Situru yang senantiasa menjadi imam bagi keluarga kami. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudari ku, Muddrifa, Mutmainnah, Munadiah, Mus’ab dan Ma’shum yang senantiasa memberikan dukungan baik moril ataupun materil selama penulis menimba ilmu hingga menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar penulis di Kabupaten Bantaeng yang tidak sempat disebutkan satu persatu.



Sebagai suatu hasil penelitian, tentulah melibatkan partisipasi banyak pihak yang telah berjasa. Olehnya itu penulis berterima kasih sebesar-besarnya dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Fadli Andi Natsif, S.H.,M.H. dan Bapak Ashabul Kahfi, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Marilang, M.Hum selaku penguji I dan Bapak Dr. H. Kasjim Salenda, M. Th.I selaku penguji II yang telah memberikan nasehat, saran dan perbaikan dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Para dosen pengajar dan staf Fakultas Syari'ah Dan Hukum Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar
7. Kasat Reserse Narkoba Polres Bantaeng beserta jajarannya dan Kepala Rutan Kelas IIB Bantaeng beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktu dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian..
8. Kepada keluarga besar penulis yang berada Di Kota Makassar ,terkhusus paman penulis Anas Hasan,S.H, Drs. Lahaya Djari, S.H, M.H serta *khola* penulis Dra. Wahidah Hasan, Dra. Dauha Hasan, Norma Hasan yang telah memberikan doa

dan dukungan selama menjalani proses perkuliahan sampai selesai.

9. Kepada sepupu penulis, Amirah Lahaya, S.H, M.Kn, Ahmad Imam Lahaya, S.H, Atika Benazir Lahaya dan Sri Mega Kurnia Anas, yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman serta dukungan selama penulis dalam proses menimba ilmu.
10. Terima kasih kepada Fifi Nur Alfiah Ramli, atas doa dan semangatnya serta pengertian yang diberikan sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Ani, Anti, Mira, Awal dan Daeng Basri dan orang-orang yang bersama penulis di rumah, yang memberikan dukungan kepada penulis.
12. Keluarga besar Ilmu Hukum Khususnya Kelas 5,6 Angkatan 2013, saudara-saudara seperjuangan, khususnya Ilham Suyuti ikhsan Dan Muh Nur Khutbnullah Lissalam. Semoga Allah SWT Merahmati persaudaraan kita.
13. Keluarga Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng – Raya (HPMB-Raya) Cabang Ba’ba Eja yang senantiasa selalu memberikan dukungan yang terbaik.
14. Keluarga KKN-R Angkatan 53 kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino, Lingkungan Batulapisi Dalam yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Apabila skripsi ini jauh dari kesempurnaan harap dimaklumi, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, 12 Mei 2017

Penulis,

Muh Hasan

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	9-36
A. Kriminologi .....	9
B. Tindak Pidana.....	17
C. Narkotika.....	22
D. Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	37-41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	37

B. Metode Pendekatan .....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Populasi dan Sampel .....	39
E. Metode Pengumpulan Data .....	39
F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42-71</b>
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng.....	42
B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Terkait Dalam Menanggulangi Maraknya Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69-70</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Implikasi Penelitian.....	70
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>89</b>



## DAFTAR TABEL

1. Data Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng Kurun Waktu 2014-2016 .....	43
2. Jenis Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng Kurun Waktu 2014-2016 .....	44
3. Daftar Domisili Pelaku Kasus Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng Kurun Waktu 2014-2016 .....	47
4. Tempat Narapidana Mendapatkan Narkotika .....	50
5. Pengetahuan Responden Narapidana Narkotika Terkait Narkotika .....	51
6. Alasan Narapidana Menggunakan Narkotika .....	54
7. Perilaku Narapidana Jika Mengkonsumsi Narkotika .....	56
8. Jawaban Responden Masyarakat Kabupaten Bantaeng Tentang Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeg .....	59



## ABSTRAK

**Nama : Muh Hasan**

**NIM : 10500113109**

**Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng.**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana peredaran gelap narkotika di kabupaten Bantaeng, dan upaya yang dilakukan pihak terkait khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi maraknya tindak pidana peredaran gelap narkotika di kabupaten Bantaeng.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua yakni: data hukum yang terdiri dari data hukum primer serta data hukum sekunder dan data kedua adalah data yang diperoleh dari responden narapidana serta responden masyarakat dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) sampel dari 32 (tiga puluh dua) populasi narapidana dan 100 (seratus) sampel masyarakat yang dijadikan responden. Metode penarikan sampel dengan cara *simple random sampling design*, Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah, wawancara, observasi dan kuesioner (angket). Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dengan rumus tabulasi frekuensi  $P = F/N \times 100\%$ .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana peredaran gelap narkotika di kabupaten Bantaeng terdiri dari eksternal dan internal, faktor internal adalah pribadi dari pelaku tindak pidana dan faktor eksternal adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, rendahnya pendidikan dan kurangnya perhatian pemerintah. Dan upaya yang dilakukan pihak terkait meliputi upaya preventif, upaya represif dan upaya pembinaan.

Implikasi penelitian ini adalah, untuk menekan angka tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bantaeng, maka diperlukan sinergitas antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya masyarakat atau peran aktif masyarakat ditambah dengan profesionalisme penegak hukum. Selain itu pemerintah harus meningkatkan perhatian kepada warganya dengan bekerja sama dengan media massa dan media cetak untuk mensosialisasikan bahaya narkotika dan sanksi hukumnya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Dewasa ini perkembangan kejahatan narkotika telah menakutkan bagi kehidupan manusia. Telah beribu-ribu korban, tanpa memandang umur dan status sosial, kejahatan tersebut dilakukan oleh perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas. Ironisnya yang menjadi korban mayoritas adalah dari kalangan remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus Bangsa. Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh parah pemakai dan pengedar dalam menyalahgunakan barang berbahaya tersebut.

Tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks dan tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah bersemayam dalam diri semua kalangan bahkan sampai pada kalangan yang telah berpendidikan sekalipun.

Sangat disayangkan generasi muda bangsa Indonesia yang menyalahgunakan narkotika yang seharusnya memiliki manfaat untuk kepentingan pengobatan ataupun di bidang ilmu pengetahuan, tetapi oleh generasi muda sekarang disalahgunakan untuk berbagai tujuan.

Pada dasarnya narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia, khususnya di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Di dalam dunia kedokteran, narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena di dalam narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat yang sangat besar sekaligus mudarat yang besar pula, maka peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika)<sup>1</sup>.

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Pada umumnya kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh perorangan secara sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi, dan sangat rahasia. Maka dari itu diperlukan peningkatan pengawasan pengedaran narkotika sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Di samping itu kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Bab II Pasal 4

umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum pemerintah dan masyarakat. Karena tanpa koordinasi yang baik maka hal di atas sulit untuk kita raih bersama.

Peredaran gelap narkoba ini seharusnya menjadi tanggung jawab semua Bangsa di dunia yang merasakan dampak buruk peredaran gelap narkoba. Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi hal tersebut terlihat setelah isi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika Tahun 1988 diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba Dan Psicotropika, yang kemudian menjadi salah satu dasar disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba<sup>2</sup>. Kehadiran Undang-Undang tersebut diharapkan supaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba lebih efektif, serta untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkoba

Dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba<sup>3</sup>, sangat jelas dinyatakan bahwa perkara narkoba adalah perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Namun karena motif kejahatan di bidang narkoba sudah tidak sesuai

---

<sup>2</sup> Moh. Taupik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),h.16

<sup>3</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba*, BAB XI, Pasal 64.

dengan perkembangan zaman maka pemerintah bersama DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Dengan berlakunya UU Narkotika, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak mendapat putusan hakim dengan harapan mengurangi merebaknya kejahatan di bidang narkotika. sesuai dengan tujuan dibentuknya UU Narkotika dalam Pasal 4 huruf b dan c<sup>4</sup>, tetapi kenyataannya justru semakin masifnya usaha yang dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula kejahatan di bidang narkotika bahkan malah semakin menjadi-jadi, seolah-olah tidak ada efek jera yang ditimbulkan dari penegakan hukum tersebut

Masifnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di Kota besar atau metropolitan, namun penyalahgunaan narkotika merambah sampai daerah berkembang. Informasi yang dihimpun dari media online sejak dua bulan terakhir di tahun 2016 yakni bulan Oktober – November penangkapan terhadap kasus kejahatan narkotika sebanyak 13 kasus yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, yang diyakini dapat melampaui penangkapan yang terjadi pada tahun 2015 yang hanya 14 kasus dan 9 diantaranya dapat diselesaikan. Humas Polres Bantaeng Bripta Syamsuddin bahwa pasar narkoba yang cukup besar memang ada di Kabupaten berkembang seperti Bulukumba dan Bantaeng<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BAB II, Pasal 4 huruf b dan c

<sup>5</sup> Hasan Basri, “Polres Bantaeng Rilis 122 Kasus”, Tribun Timur 06 November 2016. <http://www.timurnews.com/polre-bantaeng-rilis-122-kasus/3543/> (dikases 16 Desember 2016).



Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng**”

### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bantaeng. Mengenai gambaran fokus penelitian yang hendak penulis teliti adalah yang pertama, adalah faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bantaeng dan fokus penelitian yang kedua adalah upaya penanggulangan terhadap peredaran gelap narkotika yang dilakukan pihak terkait di Kabupaten Bantaeng.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan maraknya tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bantaeng ?
2. Bagaimana upaya pihak terkait di Kabupaten Bantaeng dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bantaeng ?

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian hukum dan literatur tentang tindak pidana peredaran gelap narkotika antara lain sebagai berikut:

1. Romli Atmasasmita, dalam bukunya teori dan kapita selekta kriminologi menjelaskan bahwa hukum pidana dan kriminologi tampak seakan tidak ada keterkaitan dari keduanya. Kriminologi telah ditujukan untuk mengungkap suatu motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Sehingga uraian menjelaskan keterkaitan antara kedua disiplin ilmu tersebut.<sup>6</sup>
2. Topo Santoso dkk, dalam bukunya Kriminologi menjelaskan bahwa, kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itulah sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>7</sup>
3. A.S. Alam, dalam bukunya Pengantar Kriminologi menjelaskan bahwa kriminologi telah membawa manfaat yang tak terhingga dalam mengurangi penderitaan umat manusia yang merupakan tujuan utama mempelajari kriminologi.<sup>8</sup>
4. Moh. Taupik Makarao, dalam bukunya, Tindak pidana narkoba, menjelaskan bahwa kasus tindak pidana narkoba di Indonesia betul-betul berada pada tingkatan yang sangat mengkhawatirkan, dapat merusak

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI* (Bandung: Replika ADITAMA, 2013), h. 5.

<sup>7</sup> Topo Santoso dkk, *Kriminologi*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2012), h. 1.

<sup>8</sup> A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 15.

perekonomian Negara dan ketahanan Nasional serta merusak generasi muda bangsa.<sup>9</sup>

5. Jodia putra 2013 dalam skripsinya yang berjudul “ Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Upaya Rehabilitasinya studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta” , berkesimpulan bahwa bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal ada 3 golongan yaitu penyalahgunaan, pengedaran narkotika dan jual beli narkotika. Ketiga hal tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan dan pelanggaran lainnya yang secara langsung menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat.<sup>10</sup>
6. Fram Raditya Yunanda Ginting’s dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa bukan hanya Kepolisian Republik Indonesia Dan Badan narkotika Nasional yang berperan untuk mengurangi dan memberantas narkotika tetapi masyarakat juga memiliki peran penting untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia terutama generasi muda dari ambang kehancuran.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Moh. Taupik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),h. 7.

<sup>10</sup>Jordia Putra, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Upaya Rehabilitasinya studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga, 2013), h. 122.

<sup>11</sup>Fram Raditya Yunanda Ginting’s ,“Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ilmiah (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), h. 8.

### ***E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak yang terkait di Kabupaten Bantaeng dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bantaeng

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoretis,
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba.
  - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan pada penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Kriminologi*

##### 1. Pengertian kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1930-1911), seorang ahli antropologi Perancis.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Romli Atma Sasmita, kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambroso (1876) tentang teori atau atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori sebab akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan<sup>13</sup>. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

- a. Edwin H. Sutherland: *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

---

<sup>12</sup>A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* ( Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 1.

<sup>13</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Replika Aditama, 2013), h. 3.

- b. W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya
- c. J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibatnya.<sup>14</sup>

Wolgang, Savits dan Johnston dalam *The Sociology Of Crime and Delinquency*<sup>15</sup> memberikan definisi kriminologi sebagai:

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi merupakan kajian ilmu pengetahuan di bidang kejahatan, gejala, sebab musabab atau faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri (penjahat).

---

<sup>14</sup> A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 2.

<sup>15</sup> Topo Santoso dkk, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 12.



## 2. Skop Kriminologi

Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
  - b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan ( *breaking of laws*), dan
  - c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*Reacting toward the breaking of laws*).
- Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan (*criminal prevention*).

Adapun hal yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*Process Of Making Laws*) adalah:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relatifitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik Kejahatan

Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah :

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab kriminologi)
- b. Teori-teori kriminologi dan
- c. Berbagai perspektif kriminologis

Hal yang dibahas dalam bagian ketiga adalah pelakuan terhadap pelanggar-pelanggar Hukum ( *Reacying Toward the Breaking Laws*) antara lain:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif dan rehabilitative.

Manheim dalam bukunya *Pioneers in Criminology* mengemukakan tiga tipe masalah yang merupakan lingkup pembahasan kriminologi sebagai berikut:

- a. *The problem of detecting the law breaker (criminalist).*
- b. *The problem of the custody and treatment of the offender (penolog)*
- c. *The problem of the explaining crime and criminal behavior (the problem of scientifically accounting for the presence of crime and criminals in a society).*<sup>16</sup>

### 3. Teori-Teori Kriminologi

Setelah membahas pengertian sejarah dan pengertian kriminologi, dan skop kriminologi, berikutnya kita akan beralih ke pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori dalam kriminologi maka pada pembahasan ini difokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis.

Dalam perspektif biologis, teori yang terkenal adalah teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909). Di sini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan manusia oleh nenek moyangnya. Gen ini dapat

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Replika Aditama, 2013), h. 19.

muncul sewaktu-waktu dari turunnya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern<sup>17</sup>.

Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medisnya. Antara lain: telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok.

b. Teori yang menjelaskan perspektif psikologis

Teori psikoanalisis yang di kemukakan Sigmund Freud (1856-1939) merupakan teori yang berpandangan bahwa seseorang melakukan kejahatan atau perilaku terlarang karena hati nurani (*conscience*) atau superego yang begitu lemah atau tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id (tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id) bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi)<sup>18</sup>.

c. Teori yang menjelaskan perspektif sosiologis

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:

---

<sup>17</sup> Topo Santoso dkk, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 23.

<sup>18</sup> A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* ( Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 40-41.

### 1) *Anomie* (ketiadaan norma)

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks ini Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai<sup>19</sup>.

### 2) *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)

Kejahatan dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slums area*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat<sup>20</sup>.

### 3) *Social Control* (kontrol sosial)

Pengertian teori kontrol atau kontrol sosial merujuk pada perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

#### d. Teori yang menjelaskan kejahatan dalam perspektif lain

Teori dari perspektif lain ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan perspektif sebelumnya. Para ahli dari perspektif ini menjelaskan bahwa orang menjadi criminal bukan karena cacat internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dalam kekuasaan, khususnya mereka berada dalam sistem peradilan pidana.

<sup>19</sup> A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, h. 48.

<sup>20</sup> Topo Santoso dkk, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 67.

#### 4. Kriminologi Dan Hukum Pidana

a. Persamaan: Baik kriminologi maupun Hukum pidana mengandung unsur-unsur persamaan yaitu :

- 1) Objeknya kejahatan
- 2) Adanya upaya-upaya pencegahan kejahatan.

b. Perbedaan :

- 1) Kriminologi: ingin mengetahui apa latar belakang seseorang melakukan kejahatan, pertanyaan yang timbul adalah mengapa Mr. X melakukan kejahatan?. Sedangkan hukum pidana ingin mengetahui apakah Mr. X telah melakukan kejahatan.
- 2) Hukum pidana menetapkan terlebih dahulu seseorang sebagai penjahat, baru langkah berikutnya giliran kriminologi meneliti mengapa seseorang itu melakukan kejahatan
- 3) Kriminologi memberi bahan dalam perumusan undang-undang pidana.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa kedua disiplin ilmu ini memiliki perbedaan mendasar: hukum pidana merupakan disiplin ilmu normatif sedangkan kriminologi disiplin ilmu sosial: hukum pidana bersendikan hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadi kejahatan dalam masyarakat. Ada juga yang berpandangan bahwa hukum pidana mengkaji kejahatan dari sudut hukum, sedangkan kriminologi mengkaji kejahatan dari sudut ilmu sosial atau sering disebut sebagai “*non-normative discipline*” (Hermann manheim, 1960). Dilihat dari pendapat dan pandangan para ahli tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana dan kriminologi, tampak seakan tidak ada

keterkaitan akan tetapi secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan akan tetapi secara praktik sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya<sup>21</sup>.

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Kriminologi telah ditujukan untuk mengungkap motif pelaku melakukan kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan sebab akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat diketahui berdasarkan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.

Lebih lanjut dikatakan oleh H. Bianchi, keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap dari hukum pidana bahkan merupakan disiplin ilmu yang utama daripadanya.<sup>22</sup>

Dari uraian tersebut, jelas keterkaitan antara kedua disiplin ilmu ini sangat dekat karena secara praktis, hasil analisa kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya dalam kerangka penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan.

---

<sup>21</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Replika Aditama, 2013), h. 5.

<sup>22</sup>Arbintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2017), h. 5.



## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>23</sup>

Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaar feit* ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana diluar Indonesia. Selain istilah *strafbaar feit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu “*delict*”, yang berbeda-beda dengan *delict* yang sudah disepakati yang kemudian diterjemahkan dengan “*delik*”. Oleh karena itu terjemahn *Strafbaar feit* menimbulkan beragama pengertian yang berbeda yang diberikan oleh parah ahli hukum.

Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *Strafbaar feit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmdjaja dan Utrecht mengistilahkan *Strafbaar feit* ini dengan istilah “peristiwa pidana”<sup>24</sup>.

<sup>23</sup>Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), h. 67.

<sup>24</sup>H.M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana I*, (Malang : Setara Pers, 2016), h. 58-59.

## 2. Istilah Lain Tindak Pidana

Berikut adalah istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut

### a. Tindak pidana

Dapat dikatakan merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Karena hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002, UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Adami Chazawi, dalam bukunya “Hukum Pidana I”

### b. Peristiwa pidana.

Digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya A. Zainal Abidin, dalam bukunya “Hukum Pidana 1” meskipun ia lebih banyak menggunakan istilah delik dikaryanya yang lain.

### c. Delik

Delik sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Ultrech, walupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam buku Hukum Pidana I

### d. Pelanggaran pidana

Dapat dijumpai dalam buku “Pokok-Pokok Hukum Pidana” oleh M.H. Tritamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum

Istilah ini digunakan oleh Mr. karni dalam bukunya “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”

f. Perbuatan yang dapat dihukum

Digunakan oleh pembuat Undang-undang dalam Undang-Undang N0 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Pasal 3.<sup>25</sup>

Telah banyak dibuat defenisi *Strafbaar feit* baik dalam istilah delik, tindak pidana dan istilah lain yang disebutkan di atas. Ada yang mendefinisikan secara gambalang antara lain :

Simons, merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan oleh pada si pembuat.

Pompe, merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum

R. Tresna, mengatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>25</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, h. 45.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya R.Tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dituliskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-Undang.<sup>26</sup>

Definisi perbuatan pidana atau *Strafbaar feit* juga dikemukakan oleh Rahman Syamsuddin dalam bukunya *Merajut Hukum Indonesia*, menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam Undang-Undang maupun didalam peraturan daerah.

Melihat ada banyak istilah tentang *Strafbaar feit* dalam Bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum maka timbul pertanyaan mana yang sebenarnya? Soedarto berpendapat bahwa sama benarnya dan tidak perlu dipertentangkan.<sup>28</sup> Perbedaan itu ada karena didasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Ada yang memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam memberikan isi

---

<sup>26</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, h 73

<sup>27</sup> Rahman Syamsuddin Dkk, *Merajut Hukum Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014, h. 193.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, h. 69.

pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan dengan adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibatnya yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi (konkret), baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian kepadanya dijatuhi pidana.

Sementara ada yang memandang sebaliknya (abstrak), yaitu *Strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa dalam *Strafbaar feit* selalu adanya si pembuat yang dipidana. Oleh karena itu unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisah dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya menjadi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana (pada perbuatan) dengan syarat pidana (pada orang) tidak dipisah sebagaimana menurut paham sebelumnya.

Dikaitkan dengan penelitian penulis, maka tindak pidana narkoba adalah serangkaian tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba yang perbuatannya diatur dalam UU Narkoba. Selanjutnya akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

### **C. Narkoba**

#### **1. Pengertian Narkoba**

Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat satu (1) Undang–Undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>29</sup>.

Smith kline dan French Clinical Staff, Mengemukakan definisi tentang narkotika adalah zat – zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat – zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat – zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*)<sup>30</sup>.

## **2. Narkotika Dalam Pandangan Islam**

Pada dasarnya kata narkotika tidak tercantum dalam Al-quran maupun Al-Hadits, tapi narkotika ini dikaitkan dengan kata khamar karena sama-sama ada dampak yang ditimbulkannya yaitu sifat memabukkan. Dalam hukum islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum Islam, dan salah satu sumber hukum Islam itu yaitu dengan menggunakan metode qiyas atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (*nash/dalil*) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan.

Sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat Al-Quran yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar

---

<sup>29</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bab I, pasal 1, ayat satu (1).

<sup>30</sup>Moh. Taupik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 18.



atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.

Berikut ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan Khamar:

Q.S. Al-Baqarah/2: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah : “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu memikirkannya” (Q.S. Al-Baqarah/2:219)<sup>31</sup>

QS. Al-Maidah : ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ  
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bogor:PBR, 2007) h. 34

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah : ayat 90-91).<sup>32</sup>

Sangat jelas dari terjemahan ayat di atas bahwa khamar adalah perbuatan syaitan yang terlarang (haram), namun tidak dijelaskan haramnya narkoba, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keharaman narkoba diqiyaskan dengan haramnya khamar, karena unsur-unsur yang ada dalam khamar sama dengan yang ada dalam narkoba. Qiyas dengan mengambil persamaan *illat* hukum dari khamar yang sudah jelas hukumnya dengan narkoba yang antara lain di dalamnya terdapat narkoba merupakan masalah kontemporer yang tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an.<sup>33</sup>

Kemudian, perlu dijelaskan bahwa asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat tersebut (QS. Al-Maidah : ayat 90-91), berkenaan dengan peristiwa yang menimpa kedua (kabilah) kaum anshar yang hidup damai. Namun, jika mereka dalam keadaan mabuk karena khamar atau minuman keras, mereka saling mengganggu dan berkelahi. Ini membuat dendam kusumat di antara mereka.<sup>34</sup>

Hikmah dari ayat tersebut adalah Agama Islam berusaha mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan terhadap umat manusia.

Selain dari analogi kedua zat yakni khamar dan narkoba, kita ketahui juga bahwa mengkonsumsi narkoba tanpa pengawasan dokter merupakan perbuatan yang

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bogor: PBR, 2007), h. 123.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah Jilid IV*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 326.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Quran Tajwid, Terjemahan, Asbabun Nuzul* , (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006) h. 123.

merugikan dan perbuatan yang akan merusak diri pemakainya atau dengan kata lain membinasakan dirinya (pemakai).

### 3. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 (satu) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi:<sup>35</sup>

- a. Narkotika golongan 1 : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. seperti *tanaman papaver somniferum L, Opiun mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, tetrachydrocannabinol*.
- b. Narkotika golongan 2 : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. seperti *Alfasetilmetadol, alfametadol, alfaprodina, alfentanil, allilprodina, betametadol, dimenoksadol, benzetidin*.
- c. Narkotika golongan 3 : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. seperti *Asetildihidrokodeina, dekstropropoksifena, dihidrokodeina, etilmorfina, nikodikodina, polkodina*.

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, bab III, pasal 6, ayat satu (satu).

Berdasarkan golongan diatas maka narkoba sangat beragam jenisnya sesuai dengan isi Lampiran I UU Narkoba

Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah narkoba yang marak disalahgunakan dikalangan pelaku tindak pidana narkoba. Di bawah ini adalah jenis narkoba yang sering digunakan oleh pelaku beserta pengaruh yang ditimbulkan :

a. Opiat atau opium (candu)

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain *opium* adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkoba jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh narkoba jenis candu ini adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Menimbulkan rasa kesibukan (*rushing sensation*).
- 2) Menimbulkan semangat.
- 3) Merasakan waktu berjalan lambat.
- 4) Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
- 5) Merasa rangsangan birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
- 6) Timbul disekitar mulut dan hidung.

b. Morfin

Adalah zat utama yang berkhasiat narkoba yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis

<sup>36</sup> Mahyuni Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Di Kota Makassar, Skripsi*, (Gowa, Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2010), h. 13.

narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat.

Adapun akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Menimbulkan euphoria.
- 2) Mual, muntah, sulit buang hajat.
- 3) Kebingungan.
- 4) Jantung berdebar-debar.
- 5) Gelisah dan perubahan suasana hati.
- 6) Mulut kering dan perubahan warna muka.

c. Heroin atau putaw

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti yang telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphine*, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putaw. Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi dengan dosis yang lebih, bahkan bisa menyebabkan kematian seketika. Berikut adalah akibat yang ditimbulkan :<sup>38</sup>

- 1) Tekanan darah menurun.
- 2) Otot-otot menjadi lemas.
- 3) Diafragma mata.
- 4) Menghilangkan kepercayaan diri.
- 5) Ketergantungan dalam beberapa hari.
- 6) Kesulitan dorongan seksual, kesulitan buang air besar.

<sup>37</sup> Mahyuni Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Di Kota Makassar*, h. 13.

<sup>38</sup> Mahyuni Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Di Kota Makassar*, h. 14.

d. Ganja atau kanabis

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*. Sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashish* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja. Adapun akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Denyut jantung lebih cepat.
- 2) Mulut dan tenggorokan kering.
- 3) Pemakai menjadi agresif.
- 4) Bilamana pemakaian dihentikan maka akan menimbulkan sakit kepala, mual berkepanjangan, rasa letih/capek.
- 5) Selara makan bertambah.

e. LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar  $\frac{1}{4}$  perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Adapun akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Timbul rasa halusinasi tempat, warna dan waktu.
- 2) Biasanya halusinasi ini tergabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya.
- 3) Menjadikan perasaan indah, nyaman dan lama kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan (paranoid).

---

<sup>39</sup> Mahyuni Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Di Kota Makassar*, h. 15.

<sup>40</sup> Mahyuni Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Di Kota Makassar*, h. 16.

- 4) Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
- 5) Disorientasi.
- 6) Depresi dan pusing.
- 7) Panik dan rasa takut berlebihan.
- 8) Gangguan persepsi seperti merasa kurus dan kehilangan berat badan.

f. Kokain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh kokain yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

- 1) Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan.
- 2) Hasutan (agitasi), kegelisaan, kewaspadaan dan dorongan seks.
- 3) Menimbulkan masalah kulit.
- 4) Kesulitan bernafas.
- 5) Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
- 6) Merusak paru-paru.
- 7) Memperlambat pencernaan.
- 8) Paranoid.
- 9) Merasa seperti ada kutu yang berjalan di atas kulit.
- 10) Gangguan penglihatan.
- 11) Berbicara seperti menelan.

---

<sup>41</sup> Mahyuni Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Di Kota Makassar*, h. 17.

12) Kebingungan.

g. Amfetamin

Nama generik amfetamin adalah *D-pseudo epinerfin* yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurangan sumbatan hidung. Amfetamin bekerja lebih lama dan efek halusinansinya lebih kuat dibandingkan *metildioksi amfetamin*. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Suhu badan naik.
- 2) Merasa sangat bergembira.
- 3) Menjadi lebih agresif.
- 4) Kehilangan nafsu makan.
- 5) Tekanan darah meningkat.
- 6) Mulut kering dan merasa haus.
- 7) Sakit kepala, pusing.
- 8) Timbul rasa letih, takut dan depresi dalam beberapa hari.
- 9) Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium.

Selain jenis narkoba diatas, berdasarkan data yang di himpun dari DITRESNARKOBA POLDA JATENG yang dikutip dari buku P4GN (Pencegahan & Pemberantasan, Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba), ada jenis narkoba baru yang ditemukan antara lain sebagai berikut<sup>43</sup> :

<sup>42</sup> Mahyuni Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Di Kota Makassar*, h. 18.

<sup>43</sup> DITRESNARKOBA POLDA JATENG, *P4GN*, 2013, h 16



- a. *Benzylpiperazine* : Euphoria dan stimulan, efek lainnya adalah persepsi terhadap warna, rasa, musi yang secara subyektif dapat berlangsung selama 4-6 jam.
- b. *Para-methoxymethamphetamine* : *Recreational drugs* yang bersifat stimulan dan memiliki kecendrungan menghasilkan beberapa kasus hypertmia pada dosis rendah.
- c. *Methylone* : Menyebabkan euphoria atau dysphoria, susah tidur, halusinasi, menaikkan tekanan darah, hypertermia dan anorexia.
- d. *Mephedrone* : susah berkonsentrasi, halusinasi, susah bernafas, menaikkan tekanan darah dan efek yang sejenis dengan ekstasi.
- e. *Petendrone* : efeknya adalah stimulan dan tergolong *entactogen drugs* yaitu yang bersifat psychoactive.
- f. *4-Methyl-N-ethylcathionone* : efeknya adalah stimulan dan tergolong *entagtogen drugs* yang bersifat psychoactive.
- g. *N-ethyl-cathinone* : efeknya adalah stimulant dan tergolong *entagtogen drugs* yang bersifat psychoactive.
- h. *MDPV (3,4-methylenedioxypyrovalerone)* : menaikkan tingkat kesadaran, menaikkan energy dan motivasi, menaikkan tingkat konsentrasi, menaikkan tingkat efek seksualitas, hilangnya keinginan untuk makan dan tidur.
- i. *JHW-018 (1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole)* : efek sama dengan mariyuana dan di otak menempati reseptor agonis cannabinoid.
- j. *XLR-11 (5"-fluoro-UR-144)*: Cannabinoid sintetis generasi ketiga yang memiliki efek yang sama dengan mariyuana.

k. *2-CB (2,5-dimethoxy-4-bromo)* : Efek halusinasi dan stimulan seperti MDMA/ekstasi.

l. *DOC (2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine)* : mempengaruhi tingkah laku dan persepsi di otak, meningkatkan efek visual penglihatan, menaikkan kewaspadaan terhadap suara dan pergerakan.

m. *Mitragyna* : efek depresi, ketergantungan, rasa sakit yang kronis, menaikkan tekanan darah, susah tidur. Efek tersebut mirip dengan opiat dan cocain.

#### ***D. Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika***

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Sebelumnya telah dijelaskan tentang tindak pidana secara umum, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan secara spesifik tentang tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian tindak pidana maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika adalah serangkaian tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika yang perbuatannya diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara dan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Tindak pidana narkotika menurut UU Narkotika memiliki banyak jenis tindak pidana yang diuraikan secara singkat pada sub bab selanjutnya.

##### **2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika**

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika yang secara umum mengatur penggunaan narkotika dan secara khusus mengatur ketentuan-

ketentuan pidana yang terdapat dalam BAB XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dengan jumlah pasal 37.<sup>44</sup> Berikut pengelompokan kejahatan di bidang narkoba:

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba

Kejahatan tersebut bukan hanya kejahatan yang memproduksi narkoba saja melainkan perbuatan sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonvensi, merakit, dan menyediakan narkoba untuk semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkoba

Kejahatan narkoba ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkoba, diatur dalam pasal 81. Kemudian masih ada tindak pidana di bidang pengangkutan narkoba yang khusus kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik

c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba.

Kejahatan menyangkut jual beli disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkoba. Dalam tindak pidana narkoba ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkoba juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkoba.

d. Kejahatan yang menyangkut jual penguasaan narkoba

Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkoba golongan I dengan tindak pidana menguasai narkoba golongan II dan III, karena golongan narkoba tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba*, bab XV, pasal 111-148.

e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dan untuk orang lain.

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-undang narkotika memberikan kewajiban kepada diri atau keluarga pecandu untuk melaporkan diri atau keluarganya yang pecandu, kewajiban tersebut apabila tidak dilaksanakan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan.

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika

Seperti diketahui bersama bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, kemudian untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau pada media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi kejahatan narkotika yang menyangkut label dan publikasi.

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika

Kejahatan yang menyangkut dengan proses peradilan meliputi, pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sehingga perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan yang bertujuan untuk proses peradilan tidak lancar atau tidak jadi sama sekali merupakan tindak pidana.

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Dalam perkara narkoba ada kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan yang dibuat dan dimasukkan dalam berkas berita acaranya. Apabila dilakukan maka dapat dikenakan pidana.

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan dimuka sidang persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka ia wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya. Dan bila dalam perkara narkoba saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana.

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang narkoba untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkoba yang ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkoba sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga tersebut dapat dijatuhi pidana.

l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaat anak di bawah umur

Kejahatan di bidang narkoba memanfaatkan anak yang cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dengan menggunakan data sekunder dan praktik dengan menggunakan data primer.

###### **2. Lokasi penelitian**

Dalam rangka menyusun skripsi ini maka penulis memilih lokasi penelitian di kabupaten Bantaeng tepatnya di kantor Polres Bantaeng dan Rutan Kelas II Kabupaten Bantaeng. Penulis memilih Kabupaten Bantaeng sebagai lokasi penelitian, karena dengan melihat realita maraknya penyalahgunaan narkoba dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Bantaeng

##### ***B. Metode Pendekatan***

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, artinya penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem-finding*) lalu menuju pada identifikasi masalah yang ditemukan ( *problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-PRESS, 1986)h. 10

### C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>46</sup>, yakni perilaku warga masyarakat, wawancara narasumber serta pakar berkaitan dengan penulisan skripsi ini
2. Data sekunder, merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi<sup>47</sup>, yakni data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan<sup>48</sup>.
  - a. Bahan hukum primer, berupa Peraturan perundang-undangan.
  - b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain.
  - c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-PRESS, 1986) h. 12

<sup>47</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010) h. 57.

<sup>48</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 392.

#### ***D. Populasi dan Sampel***

Selain sumber data di atas, untuk memperoleh data yang akurat maka digunakan populasi dalam penelitian ini, yakni narapidana narkoba di Rutan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng sebanyak 32 (tiga puluh dua) yang disebut sebagai jumlah populasi, sedangkan ditarik sampel sebanyak 25 (dua puluh lima) narapidana. Selain itu, dilakukan penarikan sebanyak 100 (seratus) sampel masyarakat kabupaten Bantaeng yang bukan merupakan pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam penelitian ini penarikan sampel menggunakan metode *probability sampling design*, yakni metode yang memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk terpilih menjadi unsur dari suatu sampel<sup>49</sup>. Kemudian proses penarikannya dengan cara *simple random sampling design*, dengan cara pelaksanaannya yang sederhana dengan sistem acak.

#### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

Dalam hal ini observasi yang digunakan dengan menggunakan instrumen pengamatan.

2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap pihak-pihak terkait dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-PRESS, 1986)h. 174.



Bantaeng, anggota SATRESNARKKOBATA POLRES Bantaeng serta tokoh masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Bantaeng. Serta pihak lain yang dianggap terkait dalam penyusunan skripsi ini.

### 3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan sejumlah lembaran pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Angket dengan format dan sistematika yang sederhana namun jelas dapat menggambarkan keadaan para pelaku kejahatan merupakan sumber studi kriminologi yang baik.<sup>50</sup> Dalam hal ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah memiliki opsi jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang disediakan.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah:

1. Daftar Pertanyaan.
2. Alat tulis, yaitu ballpoint dan kertas.
3. Alat rekam, yaitu *Smartphone* sekaligus berfungsi sebagai alat dokumentasi.

---

<sup>50</sup> Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi* , (Yogyakarta : Thafa Media), 2012, h.93

### ***G. Teknik Pengolahan Dan Analisis***

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dijalankan dengan mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Kemudian data yang diperoleh dari responden, baik responden narapidana maupun masyarakat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik atau biasa disebut tabulasi frekuensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan : P = Persentase (%)

N = Jumlah Sampel

F = Frekuensi Jawaban Responden.

## BAB IV

### PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTAENG

#### ***A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Maraknya Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng.***

Maraknya tindak pidana peredaran gelap narkotika pada suatu daerah dapat dilihat dari data kejahatan narkotika di daerah tersebut, maka dari itu terlebih dahulu penulis akan menyajikan data yang terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika di kabupaten Bantaeng yang penulis peroleh dari penelitian yang dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Bantaeng, dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng.

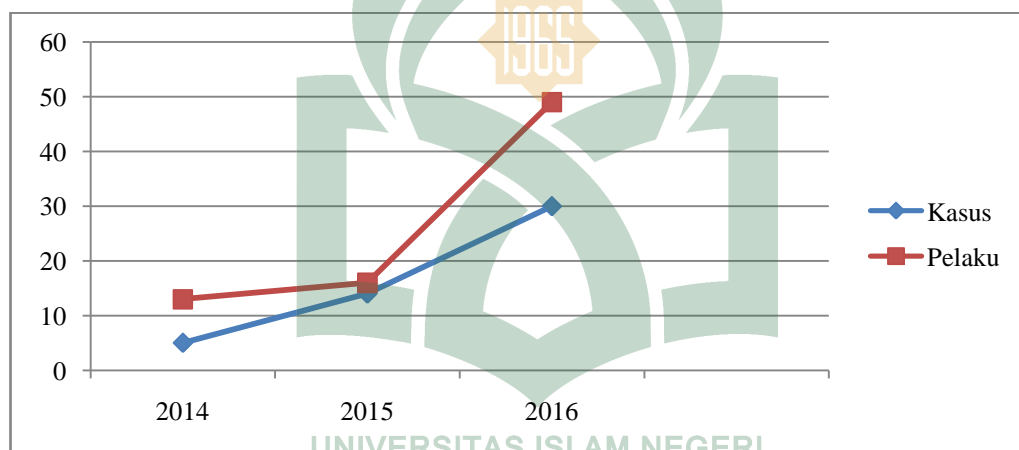
Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Bantaeng dalam kurun waktu 2014-2016, dalam kurun waktu tersebut tindak pidana peredaran gelap narkotika meningkat setiap tahunnya, berikut data yang diperoleh dari hasil penelitian:

**Tabel 1**

**Data Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng  
Kurun Waktu 2014-2016**

No	Tahun	Kasus	Pelaku
1	2014	5	13
2	2015	14	16
3	2016	30	49
Jumlah		49	78

Sumber : Polres Bantaeng 2017



Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 terdapat 49 kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Bantaeng yang dilakukan oleh 78 pelaku, hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika di kabupaten Bantaeng mengalami kenaikan cukup besar setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pelaku pada tahun 2014 sebanyak 13 pelaku dan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2016 mencapai 49 kasus. Dari tabel di atas terdapat hal menarik yang ditemukan di lapangan, yakni jumlah kasus yang terjadi lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku yang melakukan kejahatan narkotika,

hal demikian dijelaskan oleh KBO RES NARKOBA Polres Bantaeng bapak Agus Purnama<sup>51</sup>, bahwa kejahatan narkoba yang terjadi di beberapa daerah pada khususnya wilayah hukum Polres Bantaeng dilakukan secara berkelompok dan sistematis, sehingga melibatkan beberapa pelaku, kejahatan yang dilakukan secara berkelompok ataupun kejahatan yang ditemukan berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya akan diproses dengan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan dalam satu berkas perkara, dengan menerapkan pasal yang berbeda sesuai dengan peranan para pelaku tersebut, sehingga memungkinkan jumlah pelaku lebih banyak dibanding kasus yang terjadi.

Dari penjelasan KBO RES NARKOBA Polres Bantaeng, mengindikasikan bahwa kejahatan narkoba di kabupaten Bantaeng merupakan kejahatan yang terstruktur dan sistematis yang membutuhkan penanganan khusus. Selanjutnya akan disajikan data mengenai jenis-jenis tindak pidana narkoba kurun waktu 2014-2016:

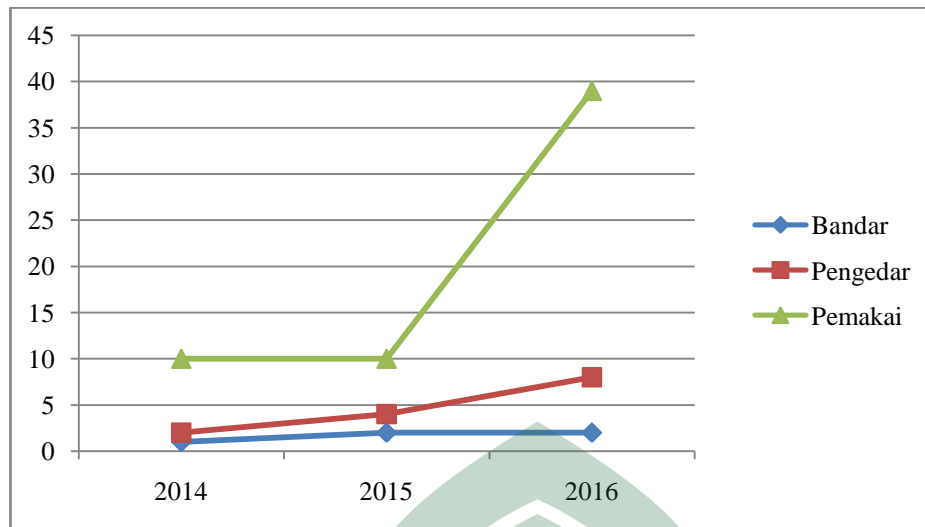
**Tabel 2**

**Jenis Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Di Kabupaten Bantaeng  
Dalam Kurun Waktu 2014-2016**

No	Tahun	Bandar	Pengedar	Pemakai	Jumlah
1	2014	1	2	10	13
2	2015	2	4	10	16
3	2016	2	8	39	49
Jumlah		5	14	59	78

Sumber : Polres Bantaeng 2017

<sup>51</sup>Agus Purnama ( 40 Tahun), KBO RES NARKOBA Polres Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 16 Maret 2017.



Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2014-2016 terdapat tiga jenis tindak pidana narkotika yakni, bandar narkotika, pengedar narkotika dan pemakai narkotika atau sesuai dengan pasal 112 ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), dan pasal 127 ayat (1) a UU NARKOTIKA<sup>52</sup>:

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Data yang terdapat dalam tabel 2 di atas ditambah dengan grafik tersebut, dijelaskan bahwa dalam kurun waktu tahun 2014-2016 pelaku tindak pidana bandar narkotika dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan besar, lain halnya dengan jenis tindak pidana pengedar narkotika setiap tahunnya mengalami peningkatan

<sup>52</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB XV pasal 112,

meski tidak begitu signifikan, berbeda dengan tindak pidana pemakaian narkoba atau penyalah guna narkoba yang mengalami peningkatan, jumlah pemakaian narkoba pada tahun 2014 sama dengan jumlah pemakaian narkoba pada tahun 2015, nanti pada tahun 2016 jumlah pemakaian yang diproses hukum mengalami peningkatan yang cukup besar sesuai dengan grafik tersebut.

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa kejahatan narkoba di kabupaten Bantaeng sudah sangat memprihatinkan karena setiap tahunnya baik pelaku ataupun jenis kejahatan yang terjadi mengalami kenaikan yang cukup besar, sehingga pencegahan dan penanganan harus ditingkatkan dan mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah, penegak hukum serta masyarakat untuk mengurangi angka kejahatan peredaran gelap narkoba yang terjadi di kabupaten Bantaeng.

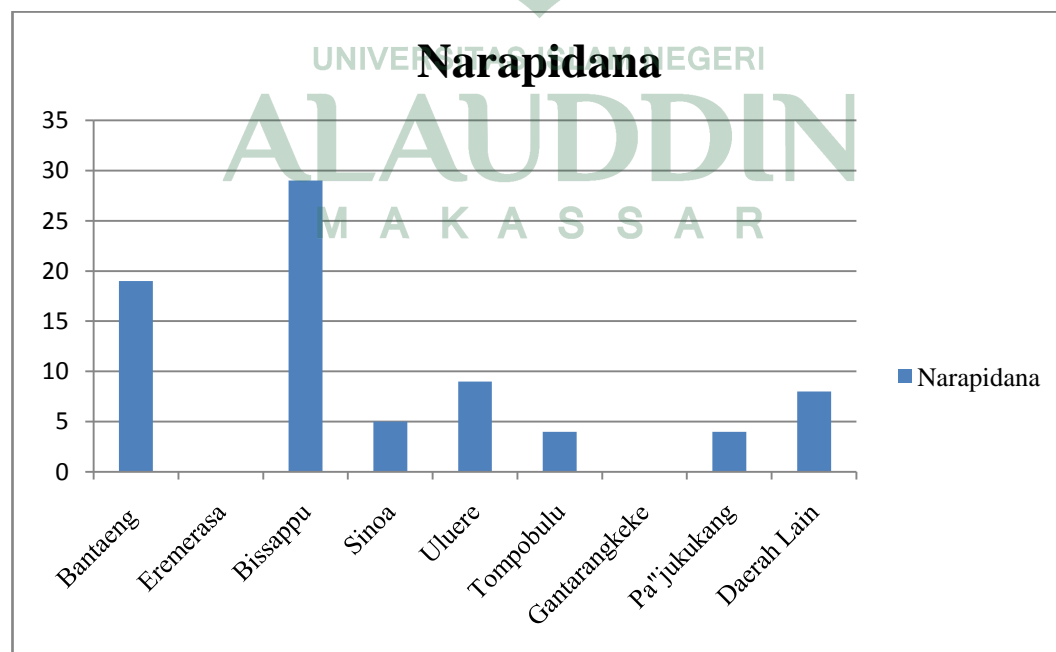
Kejahatan narkoba yang terjadi akan lebih mudah diketahui penyebabnya jika terlebih dahulu diklasifikasikan domisili pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba pada suatu daerah. Berikut ini akan diklasifikasikan domisili pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng:

**Tabel 3**

**Daftar Domisili Pelaku Kasus Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di  
Kabupaten Bantaeng 2014-2016**

No	Kecamatan	Pelaku
1	Bantaeng	19
2	Eremerasa	-
3	Bissappu	29
4	Sinoa	5
5	Uluere	9
6	Tompobulu	4
7	Gantarangeke	-
8	Pa'jukukang	4
9	Lain-lain	8
Jumlah		78

Sumber : Rutan Kelas IIB Bantaeng 2017





Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa domisili narapidana narkoba di kabupaten Bantaeng kurun waktu 2014-2016 yang paling menonjol adalah terletak di dua kecamatan yakni Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Bantaeng, Sedangkan ada dua kecamatan yang tidak memiliki warga yang terjaring tindak pidana narkoba.

Mengenai narapidana yang banyak terdapat pada dua kecamatan yakni kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Bissappu, dijelaskan oleh Bapak Kepala Seksi Pelayanan pada Rutan Kelas IIB Bantaeng<sup>53</sup>. Bahwa Kecamatan Bantaeng merupakan Ibukota kabupaten Bantaeng sehingga wilayah yang strategis bagi pelaku tindak pidana narkoba untuk melakukan aksinya. Selain itu Kecamatan Bantaeng memiliki tempat yang dijadikan hiburan bagi para pengunjung dari luar daerah jika berkunjung di Bantaeng sehingga budaya atau gaya modern yang dibawa oleh para pengunjung yang berbeda-beda ditiru oleh warga yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Bissappu, Setengah wilayah dari kecamatan Bissappu merupakan wilayah kota di kabupaten Bantaeng namun faktor yang paling berpengaruh adalah beberapa bandar besar narkoba di kabupaten Bantaeng berada di wilayah Kecamatan Bissappu yakni terletak di Kelurahan Bonto Sungguh Dan Bonto Atu sehingga Warga di sekitar wilayah tersebut lebih mudah terpengaruh.

Dari hasil wawancara tersebut, banyaknya pelaku di dua daerah tersebut disebabkan pengaruh eksternal dari pelaku kejahatan yakni lingkungan tempat pelaku kejahatan berdomisili. Selain itu kejahatan yang terjadi disebabkan oleh peniruan dengan pergaulan yang ada di sekitar pelaku kejahatan, hal tersebut sebagaimana dalam Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Soedjono

---

<sup>53</sup> Mansyur (50 tahun), Kepala Seksi Pelayanan Rutan Kelas IIB Bantaeng ,wawancara, Bantaeng, 5 April 2017.

Dirdjosisworo “kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung”.<sup>54</sup>

Kemudian dari data tabel 3 (tiga) terdapat pelaku yang berdomisili di luar kabupaten Bantaeng, yakni sebanyak 8 (delapan) pelaku, yang berasal dari dua kota berbeda yakni Kota Palu (Sulawesi Tengah) dan kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), data tersebut mengindikasikan bahwa kejahatan narkoba di kabupaten Bantaeng tidak terlepas dari pengaruh orang luar yang membawa narkoba masuk ke kabupaten Bantaeng kemudian berinteraksi dengan masyarakat kabupaten Bantaeng, sehingga pola perilaku menyimpang khususnya penyimpangan narkoba yang dibawa masyarakat luar akan dipelajari (ditiru) oleh warga sekitar (asosiasi diferensial) sebagaimana teori dari E.H. Sutherland di atas. Untuk mempertegas faktor lingkungan atau faktor eksternal dari yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba di kabupaten Bantaeng yang penulis peroleh dari wawancara Kepala seksi Pelayanan Rutan Kelas IIB Bantaeng, kemudian dilakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode pemberian kuisioner kepada narapidana, penulis memperoleh data sebagai berikut :

---

<sup>54</sup>Arbintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo), 2017, h 122.

**Tabel 4****Tempat Narapidana Mendapatkan Narkotika**

No	Tempat	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tempat Kerja	-	-
2	Sekolah	-	-
3	Rumah Teman	23	88
4	Tempat Hiburan	3	12
5	Lain-lain	-	-
Total		25	100

Sumber : Lembaran Kuesioner Narapidana Narkotika Rutan Kelas IIB Bantaeng

Data di atas menegaskan bahwa faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkotika di kabupaten Bantaeng, hal tersebut terlihat dengan banyaknya responden menjawab bahwa di rumah teman merupakan tempat yang paling mudah mendapatkan narkotika. Pergaulan yang tidak tepat dan pengawasan yang kurang akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku. Selain itu data di atas menunjukkan bahwa tempat hiburan menempati urutan kedua tempat narapidana mendapatkan narkotika hal demikian dikarenakan merupakan tempat untuk melepas kepenatan dan kebosanan ataupun tempat untuk menyalurkan rasa frustrasi seseorang, sehingga dengan demikian akan mudah mendapatkan narkotika.

Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkotika di kabupaten Bantaeng maka penulis mengembangkan penelitian dengan mencari tahu pengetahuan responden tentang narkotika, karena menurut hemat penulis rendahnya pemahaman terhadap suatu kejahatan atau objek kejahatan akan sangat

berpengaruh terhadap kejahatan tersebut, berikut data tentang pemahaman responden narapidana terhadap narkoba:

**Tabel 5**

**Pengetahuan Responden Narapidana Terkait Narkoba**

No	Pertanyaan	Frekuensi		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Mengetahui narkoba	23	2	92	8
2	Apakah narkoba bermanfaat	4	21	16	84
3	Mengetahui jenis-jenis narkoba	16	9	64	36
4	Mengetahui bahaya narkoba	17	8	68	32
5	Mengikuti sosialisasi narkoba	6	19	24	76
6	Apakah saudara seorang pengedar narkoba	8	17	32	68

Sumber : Lembaran Kuesioner narapidana Narkoba Rutan Kelas IIB Bantaeng

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sebanyak 25 responden yang menjadi objek penelitian dan hampir semua responden menjawab mengetahui tentang narkoba (92%), sedangkan kebanyakan dari responden (84%) di atas menjawab bahwa narkoba tidak memiliki manfaat, lalu terkait bahaya narkoba bagi kehidupan, responden lebih banyak menjawab atau menyadari bahwa narkoba berbahaya bagi kehidupan.

Dominannya narapidana menjawab narkoba berbahaya bagi kehidupan serta tidak memiliki manfaat menjadi tanda tanya, mengapa narapidana memakainya dan tidak merasa takut untuk mengkonsumsinya. Hal tersebut dijelaskan oleh Subagyo Partodiharjo, bahwa pengedar narkoba menyebarkan isu yang menyesatkan seperti: kalau pintar mensiasatnya, akibat buruk pemakaian narkoba tidak ada, pemakaian narkoba yang berakibat buruk itu disebabkan

oleh kebodohan pemakainya, narkoba tidak berbahaya sama sekali sebab sudah ada penawarnya, obat penawar narkoba mudah didapat sebab ada pada tumbuhan di sekitar kita<sup>55</sup>. Itulah isu yang menyesatkan yang disebar oleh para pengedar. Selanjutnya data tersebut (tabel 5) menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) responden yang menjawab tidak mengetahui tentang narkoba, menurut pengakuan dari responden tersebut, bahwa tidak mengetahui mengapa ia ditangkap dan terlibat kasus narkoba, keterlibatannya hanya berdasarkan tindakan penjemputan yang dilakukan oleh seseorang ia kenal.<sup>56</sup> Meskipun demikian pengakuan dari responden akan dibuktikan pada persidangan karena kasus tersebut masih dalam proses persidangan.

Selain itu, dapat pula kita ketahui bahwa pemahaman responden tentang narkoba, jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba sudah sangat bagus namun pemahaman tersebut tidak didapatkan dari hasil sosialisasi pemerintah tentang narkoba, hal tersebut dapat kita lihat dari rendahnya frekuensi atau persentase responden mengikuti sosialisasi tentang narkoba yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, salah satu faktor dari maraknya tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba adalah rendahnya sosialisasi tentang narkoba yang dilakukan pemerintah kabupaten Bantaeng. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia kabupaten Bantaeng (KNPI Bantaeng) sekaligus Pendiri dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya (HPMB- Raya) Munawir Nuh dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa<sup>57</sup>: Maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng disebabkan oleh beberapa alasan antara lain:

<sup>55</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenalai Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*.(Jakarta: Esensi, 2010), h. 71

<sup>56</sup> Ramli Bani (48 Tahun), Responden Pelaku Kejahatan Narkoba, Wawancara, Bantaeng, 16 April 2017.

<sup>57</sup> Munawir Nuh (34 Tahun), Sekretaris KNPI Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 21 April 2017.

1. Sosialisasi tentang bahaya narkoba masih sangat rendah khususnya di tingkat pelajar
2. Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten sampai pemdes/lurah terhadap bahaya narkoba
3. Bantaeng sudah menjadi kota destinasi yang membuat para pengedar dengan leluasa membawa narkoba masuk ke Bantaeng
4. Rendahnya pihak pengamanan oleh pihak berwajib.

Lain halnya yang dikatakan oleh Kasat Narkoba Polres Bantaeng, bahwa maraknya tindak pidana narkoba di kabupaten Bantaeng khususnya penyalahgunaan narkoba, dikarenakan warga Bantaeng yang gemar dengan narkoba, bahkan semua kalangan sudah merasakan yang namanya narkoba khususnya pemuda, buruh bangunan, petani, serta warga kelas menengah ke atas dan tak terkecuali banyak oknum aparat kepolisian yang menggunakan narkoba semua itu karena kegemaran masyarakat Bantaeng dengan narkoba<sup>58</sup>.

Selain dari sosialisasi tentang narkoba yang kurang dari pemerintah kabupaten Bantaeng yang didapat dari tanggapan responden, penulis juga mendapatkan data dari responden, alasan responden menggunakan narkoba yang ditabulasi ke dalam tabel frekuensi sebagai berikut:




---

<sup>58</sup> Abdul Razak, (52 tahun), Kasat Narkoba Polres Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 16 Maret 2017.

**Tabel 6**  
**Alasan Narapidana Menggunakan Narkotika**

No	Alasan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Bergaul Dengan Pengguna Narkotika	5	20
2	Keinginan Untuk Mencoba Hal Baru	4	16
3	Memiliki Gaya Hidup Mewah Dan Suka Bersenang-senang	3	12
4	Untuk Menghilangkan Stres	2	8
5	Lain-lain (Meningkatkan Stamina)	8	32
6	Tidak menjawab	3	12
Total		25	100

Sumber : Lembaran Kuesioner Narapidana Narkotika Rutan Kelas IIB Bantaeng

Dari data tersebut (tabel 6) terlihat bahwa dari lima opsi jawaban yang telah disediakan, lebih banyak responden menjawab dengan pilihan lain-lain atau meningkatkan stamina sebagai alasan mereka menggunakan narkotika namun menurut Reza Pahlevi, narkotika memiliki efek merangsang tubuh menjadi lebih bersemangat, tidak mudah lelah dan mengantuk. Akan tetapi efek yang ditimbulkan ini hanya bersifat sementara. Setelah efek narkoba habis, tubuh justru akan merasa sangat kelelahan karena kurangnya istirahat. Beberapa jenis narkoba yang tergolong dalam jenis stimulan adalah kokain, sabu-sabu, dan ekstasi<sup>59</sup>. Selain itu alasan untuk meningkatkan stamina merupakan alasan sekunder atau alasan lanjutan dari alasan utama responden menggunakan narkotika, dengan kata lain responden menggunakan narkotika pada dasarnya karena bergaul dengan

---

<sup>59</sup>Reza Pahlevi, "Narkoba Menambah Stamina Mitos atau Fakta" <http://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698105/narkoba-menambah-stamina-mitos-atau-fakta> ( 6 Mei 2017)

pengguna narkoba, setelah menggunakan narkoba para pecandu merasakan meningkatnya stamina jika mengkonsumsi narkoba, dengan demikian responden lebih banyak menjawab alasan untuk meningkatkan stamina. Selain kedua alasan tersebut, terdapat alasan keinginan untuk mencoba hal baru, memiliki gaya hidup mewah dan suka bersenang-senang, serta untuk menghilangkan stress. Keseluruhan alasan narapidana menggunakan narkoba merupakan dampak dari gangguan psikologis yang dimiliki oleh narapidana.

Kurangnya pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan apabila menggunakan narkoba menjadi salah satu faktor maraknya penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bantaeng, responden lebih banyak menjawab apabila seseorang menggunakan narkoba akan merasakan sensasi kenikmatan dan tidak mengetahui bahwa apabila seseorang menggunakan narkoba maka seseorang akan ketagihan dan mencoba lagi.

Selain ketidaktahuan seseorang terhadap dampak ketagihan dan keinginan untuk mencoba lagi, ketidaktahuan lain adalah tidak mengenali narkoba, tidak tahu bentuknya, tidak tahu akibatnya terhadap fisik, mental, moral, masa depan dan terhadap kehidupan akhirat, tidak paham akibatnya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa<sup>60</sup>. Ketidaktahuan itulah yang menyebabkan orang mulai memakai narkoba. hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

---

<sup>60</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenalai Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*.(Jakarta: Esensi, 2010), h. 71



**Tabel 7****Tanggapan Narapidana Dampak Jika Mengonsumsi Narkotika**

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Merasakan Sensasi Kenikmatan	14	56
2	Hilangnya Kepercayaan Diri	-	-
3	Penggunanya Menjadi Temperamen	-	-
4	Pengguna Akan Ketagihan Dan Akan Mencoba Hal Baru	3	12
5	Lain-Lain (Kuat Bekerja)	7	28
6	Tidak Menjawab	1	4
Total		25	100

Sumber : Lembaran Kuesioner Narapidana Narkotika Rutan Kelas IIB Bantaeng.

Seseorang akan lebih mudah terpengaruh untuk menggunakan narkotika apabila bergaul dengan pengguna narkotika (60%). Selain itu tidak menerapkan kehidupan beragama (20%) juga berpengaruh terhadap tindakan penyalahgunaan narkotika, menerapkan kehidupan beragama akan membentengi seseorang dari perbuatan yang menyimpang dari norma agama ataupun norma hukum. Selain itu narkotika lebih mudah disalahgunakan jika mendapatkan narkotika secara gratis (8%). Serta memandang narkotika sebagai alat pelarian jika seseorang frustrasi dengan masalah yang keluarga yang dialami (8%). Narkotika dipandang sebagai pembawa kenikmatan, nikmat bebas dari rasa kesal, kecewa, stres, takut, frustrasi. Padahal semunya hanyalah kenikmatan palsu. Nikmat yang ada pada narkotika hanyalah nikmat khayalan.

Beberapa faktor di atas menjelaskan faktor eksternal responden melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba, selain itu faktor internal meliputi pendidikan responden, responden yang berpendidikan dasar (SD, SMP), sebanyak (36 %) atau 9 (sembilan), responden yang berpendidikan menengah (SMA) sebanyak (60%) atau 15 (lima belas), responden berpendidikan tinggi (D3, SI, DST) sebanyak (4%) atau 1 (satu).

Dari data tersebut dijelaskan bahwa pendidikan berpengaruh dalam perilaku kehidupan seseorang. Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>61</sup> Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin rendah keinginan untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan. Pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang menyimpang dan membahayakan khususnya bahaya narkoba dan sanksi hukum yang akan didapatkan jika melakukan kejahatan tersebut akan menekan angka kejahatan yang terjadi.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa responden yang mengaku sebagai pengedar narkoba, sebanyak 8 (delapan) atau (32%) dari 25 responden yang mengaku sebagai bandar narkoba, dari keterangan responden tersebut diperoleh data bahwa sebanyak 4 (empat) atau (16%) responden yang menjawab permasalahan ekonomi sebagai penyebab mereka mengedarkan narkoba. Bisnis narkoba merupakan bisnis yang menjanjikan, perputaran modal yang cepat sehingga memungkinkan penjahat atau pengedar narkoba lebih memilih pekerjaan haram ini sebagai ladang pencarian uang.

---

<sup>61</sup>Arbintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2017, h 114.

Sementara itu ada 4 (empat) atau (16%) lainnya menjawab lain-lain sebagai alasan mengedarkan narkoba. Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan narapidana pengedar narkoba, lain-lain yang dimaksud adalah keuntungan atau uang yang diperoleh dari penjualan narkoba digunakan untuk membeli narkoba yang digunakan sendiri oleh narapidana dan tidak mengedarkan narkoba untuk dijadikan sebagai mata pencaharian dari narapidana, narapidana mengaku bahwa jika mengandalkan uang dari gaji yang diperoleh dari pekerjaan narapidana tidak cukup untuk membeli narkoba maka dari itu narapidana mengedarkan narkoba<sup>62</sup>.

Penelitian yang bertujuan mencari penyebab maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng tidak hanya melibatkan narapidana sebagai responden tetapi melibatkan juga masyarakat sebagai responden untuk memperkuat hasil penelitian. Berikut ini data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada masyarakat:



---

<sup>62</sup> Rajamuddin (31 Tahun), Narapidana Narkoba rutan Kelas IIB Bantaeng, Bantaeng, 16 Maret 2017.

**Tabel 8**

**Jawaban Responden Masyarakat Kabupaten Bantaeng Tentang Tindak  
Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng**

No	Pertanyaan	Jawaban		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Mengetahui Tentang Narkotika	97	3	97 %	3 %
2	Pernah Menggunakan Narkotika	9	91	9 %	91 %
3	Mengetahui Jenis-Jenis Narkotika	51	49	51 %	49 %
4	Mengetahui Bahaya Narkotika	97	3	97 %	3 %
5	Mengikuti Sosialisasi Narkotika	73	27	73 %	27 %
6	Apakah Narkotika Bermanfaat	22	78	22 %	78 %
7	Mengetahui Pelaku tindak pidana narkotika Yang Belum Diproses.	27	73	27 %	73 %
8	Tindakan Melaporkan Pelaku Kejahatan Di Bidang Narkotika	61	39	61 %	39 %

Sumber : Lembaran Kuesioner Narapidana Narkotika Rutan Kelas IIB Bantaeng.

Data di atas yang diambil dari 100 (seratus) responden masyarakat menunjukkan bahwa, mayoritas dari responden mengetahui tentang narkotika, jenis-jenis narkotika dan bahaya narkotika. Selain itu data di atas menunjukkan bahwa masih banyak pelaku tindak pidana kejahatan yang diproses oleh hukum. Selain itu partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan pelaku tindak pidana narkotika kepada pihak yang berwajib sangatlah minim. Masyarakat enggan untuk melaporkan pelaku tindak pidana narkotika ke pihak yang berwajib dikarenakan umumnya masyarakat enggan untuk berurusan dengan aparat hukum serta

dikhawatirkan apabila memberikan informasi kepada pihak berwajib hal demikian akan menjadi bumerang bagi masyarakat yang melaporkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Bantaeng dan Rutan Kelas IIB Bantaeng serta masyarakat di kabupaten Bantaeng, selanjutnya diperoleh kesimpulan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini akan mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut :

#### 1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri pelaku tindak pidana (responden) yang mendorong pelakunya untuk melakukan perbuatan pidana. Kaitannya dengan penelitian ini, ada beberapa faktor internal yang penulis temukan sebagai berikut

Pertama, mudah terpengaruh, maraknya penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipungkiri bahwa rentannya pelaku tindak pidana dipengaruhi untuk menggunakan Narkoba, terlebih jika mereka bergaul dengan orang-orang yang menggunakan barang haram tersebut. Menurut hemat penulis meskipun seseorang berdomisili pada lingkungan yang sangat buruk namun jika seseorang tersebut memiliki pribadi yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain niscaya orang tersebut akan lebih mudah terhindar dari perbuatan jahat (*delinquent*).

Kedua, keinginan untuk mencoba hal baru dan mendapat pujian, sifat inilah yang membuat seseorang akan lebih mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Rasa penasaran akan membuat seseorang tertarik menggunakan narkoba serta ingin mendapatkan pujian dari teman atau masyarakat lain.

Ketiga, pemahaman yang salah bahwa penggunaan narkoba tidak membuat ketagihan dan ingin mencoba lagi, hal demikian yang membuat seseorang

menggunakan narkoba karena menganggap narkoba hanyalah “barang” biasa yang tidak menimbulkan efek kecanduan.

## 2. Faktor eksternal

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor eksternal antara lain sebagai berikut :

### a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan sebab musabab terjadinya suatu kejahatan, lingkungan yang buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang melakukan kejahatan. Faktor ini tidak terlepas dari konsepsi Durkheim tentang manusia yang ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial, eksistensinya sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni<sup>63</sup>. Kaitannya dengan penelitian ini, narkoba yang digunakan oleh responden narapidana adalah narkoba yang didapatkan dari hasil pergaulan dari orang-orang yang menggunakan narkoba. Selain itu, domisili pelaku tindak pidana merupakan ibu kota dari kabupaten Bantaeng yang pada kenyataannya daerah yang gencar-gencarnya melakukan pembangunan sehingga kabupaten Bantaeng menjadi daerah tujuan bagi para wisatawan sehingga hal demikian itu mempengaruhi lingkungan dan budaya yang ada di daerah tersebut. Emile Durkheim meyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju masyarakat modern dan kota, maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma umum atau *a common set of rules* akan merosot<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta : Thafa Media), 2012, h.93

<sup>64</sup> Arbintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2017), h 125.

Keadaan tersebut diperparah dengan keadaan masyarakat modern seperti sekarang ini, aktivitas yang begitu sibuk dengan dipenuhi kegiatan diluar rumah sehingga waktu untuk keluarga sudah berkurang. Hal demikian yang membuat kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya sehingga membuat anak sulit untuk mengadukan permasalahan yang dimiliki. Apabila hal ini terjadi maka anak akan merasa frustrasi karena tidak ada tempat untuk menceritakan masalah yang dihadapinya.

Perasaan frustrasi itulah yang membuat anak mencari jalannya sendiri untuk menyalurkan seluruh permasalahan yang dihadapinya dengan menempuh jalan yang mudah yakni menyalahgunakan narkotika. Tanpa disadari kurangnya pengawasan dari orang tua akan mengakibatkan anak menjadi korban kejahatan khususnya penyalahgunaan narkotika.

#### b. Rendahnya Pendidikan

Semakin rendah pendidikan seseorang pendidikan seseorang maka semakin besar potensi untuk melakukan kejahatan, hal tersebut terlihat dari data responden narapidana, baik pendidikan formal ataupun pendidikan keagamaan informal, rendahnya pendidikan keagamaan atau kurang menerapkan kehidupan beragama akan berpengaruh terhadap perilaku menyimpang seseorang sebagaimana data dari responden di atas.

#### c. Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan khususnya pada penelitian ini adalah tindak pidana jenis bandar dan pengedar narkotika, semakin banyaknya pengangguran tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, serta melambung tingginya harga bahan pokok, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu tak jarang melalui cara-cara yang lebih mudah yakni menjual atau mengedarkan narkotika tanpa memperhatikan

risiko yang akan dihadapi. W.A Bonger mengatakan bahwa dari sejumlah penjahat ekonomi diketahui semakin banyaknya pengangguran penyumbang penting adanya kejahatan serta pengaruh dari harga kebutuhan bahan pokok dan rangkaiannya tidak dapat diabaikan terhadap meningkatnya suatu kejahatan, bahkan kedua hal tersebut dipandang memiliki daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesusilaan<sup>65</sup>.

Selain karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau pilihan lain, bisnis narkoba merupakan bisnis yang menjanjikan uang banyak sehingga masyarakat tertarik untuk menjalankannya.

d. Kurangnya Perhatian Pemerintah

Pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng menurut hemat penulis masih kurang hal tersebut dari data tabel 4 dan tabel 8 pada pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa kurangnya sosialisasi tentang narkoba yang dilakukan pemerintah khususnya di kalangan pelajar.

Sosialisasi yang kurang sehingga masyarakat gagal paham terhadap narkoba dan bahaya. Pemahaman yang salah dari masyarakat bahwa penggunaan narkoba tidak menimbulkan efek kecanduan merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi tentang narkoba.

**B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Terkait Dalam Menanggulangi Maraknya Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Di Kabupaten Bantaeng.**

---

<sup>65</sup>Arbintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2017), h. 111.



Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng, selanjutnya penulis akan memaparkan upaya dari pihak terkait untuk menanggulangi maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba terus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait di kabupaten Bantaeng, namun tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena suatu kejahatan akan berkembang baik dari sarana yang digunakan serta motif yang mendasari. Berangkat dari penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan maka untuk menanggulangi suatu kejahatan terjadi haruslah dimulai dari sebab kejahatan itu terjadi.

Berikut upaya yang dilakukan pihak terkait dalam menanggulangi maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng:

### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan berupa penanaman nilai-nilai yang baik dalam masyarakat.

#### **a. Upaya individu dan Tokoh Masyarakat**

Untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba dapat ditanggulangi sejak awal melalui kesadaran individu, dengan meningkatkan pengetahuan tentang narkoba, menggali informasi tentang bahaya narkoba serta membentengi diri dengan menjauhkan diri dari lingkungan buruk yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, ditambah dengan memperdalam ilmu agama dan menerapkannya dalam kehidupan.

Tokoh masyarakat berperilaku sebagai teladan, harus memberikan contoh yang baik bagi kalangan masyarakat lainnya serta memiliki sikap yang tegas dan bijaksana. Tokoh masyarakat diharapkan menjadi perpanjangan tangan dari

pemerintah ataupun penegak hukum untuk mengawasi dan melaporkan jika menemukan perilaku menyimpang.

b. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasat Narkoba Polres Bantaeng<sup>66</sup> Upaya yang dilakukan pihak kepolisian berupa kegiatan-kegiatan edukatif seperti penyuluhan hukum serta sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, sekolah-sekolah dan instansi-instansi di kabupaten Bantaeng.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba juga dilakukan dengan menyebar spanduk-spanduk yang berisikan bahaya narkoba dan sanksi hukum pelaku kejahatan narkoba yang disebar di jalan-jalan dan tempat umum. Kemudian kepolisian juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengadakan warga yang terlibat kejahatan narkoba.

Sebagai tindak lanjut daripada sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba Kepolisian Resor Bantaeng gencar melakukan Operasi Cipta Kondisi.

c. Upaya yang dilakukan pemerintah

Pemerintah kabupaten (PEMKAB) merupakan perpanjangan tangan dari Negara, yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara aman dan tenteram. Berikut program atau upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana narkoba:

1) Mengadakan penyuluhan hukum tingkat Desa dan Kelurahan

Pemerintah daerah melalui kelurahan dan desa bekerja sama dengan karang taruna melakukan sosialisasi bahaya narkoba khususnya dikalangan pemuda, sehingga

---

<sup>66</sup> Abdul Razak, (52 tahun), Kasat Narkoba Polres Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 16 Maret 2017.

dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami dan menyadari bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang dapat membahayakan diri, keluarga, orang lain dan bahkan berdampak pada perekonomian.

## 2) Mengadakan penyuluhan keagamaan

Secara umum masyarakat Bantaeng mengetahui bahwa penggunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang agama. Namun acapkali masyarakat mengabaikan hal tersebut, melalui penyuluhan agama yang dilakukan Kementerian Agama kabupaten Bantaeng bekerja sama dengan ormas islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama , Wahda Islamiyah serta ormas islam lain dengan cara melakukan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba baik secara formal melalui penyuluh agama ataupun melalui mimbar dakwah<sup>67</sup>.

## 3) Pembinaan kepemudaan

Pembinaan kepemudaan dengan melaksanakan seminar kewirausahaan dengan harapan mendorong minat pemuda dalam berwirausaha dan bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk menempatkan pemuda yang memiliki minat berwirausaha sekaligus sertifikasi dan penempatan kerja bagi pemuda yang dianggap memiliki potensi. Program tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pemuda untuk berkreasi dan berwirausaha dengan demikian pemuda memiliki kegiatan dan aktivitas sehingga terhindar dari pergaulan buruk dan sekaligus pemuda tersebut memiliki pekerjaan dan dapat terhindar dari pengaruh kejahatan khususnya di bidang narkoba<sup>68</sup>.

## 2. Upaya Represif

---

<sup>67</sup> Muh Yunus (51 Tahun), Kepala Kementerian Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 17 April 2017.

<sup>68</sup> Syahrul Bayan (37Tahun), Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 11 April 2017.

Upaya represif merupakan upaya atau tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat kejahatan terjadi. Tindakan represif memiliki standar operasional prosedur yang merupakan prosedur tetap bagi pihak kepolisian jika suatu tindak pidana terjadi, tindakan represif yang dilaksanakan berdasarkan laporan warga ataupun operasi yang dilakukan oleh pihak berwajib. Tindakan tersebut berupa pelumpuhan terhadap pelaku, penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya yang dapat menunjang operasi tersebut.

Tindakan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana narkoba bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Selain tindakan efek jera yang diberikan upaya yang lain adalah rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, tindakan rehabilitasi atau pemulihan lebih baik daripada hukuman penjara yang diberikan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba setelah melalui proses pemeriksaan di kepolisian selanjutnya pihak kejaksaan melanjutkan penyidikan dan melakukan penuntutan dengan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana.

Selanjutnya pihak kehakiman memberikan pidana maksimal kepada terdakwa dengan harapan memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

Upaya represif dari keseluruhan lembaga penegakan hukum diperkuat oleh lembaga pengadilan dengan putusan yang dikeluarkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Putusan No. 91/Pidsus/2016/PN Bantaeng, Nomor putusan tersebut merupakan nomor putusan yang memutus terdakwa tindak pidana narkoba jenis bandar narkoba yang dihukum 7 tahun penjara, denda Rp. 1.000.000.000, subsidi 2 (dua) bulan. No. 75/Pidsus/2016/PN Bantaeng, Nomor putusan tersebut merupakan nomor putusan yang memutus terdakwa tindak

pidana narkoba jenis pengedar narkoba yang dihukum 4 tahun penjara, denda Rp. 800.000.000, subsidi 1 (satu) bulan. No. 133/Pidsus/2016/PN Bantaeng, Nomor putusan tersebut merupakan nomor putusan yang memutus terdakwa tindak pidana narkoba jenis pengguna atau penyalah guna narkoba dengan hukum 1 tahun enam bulan.<sup>69</sup>

Ketiga putusan tersebut merupakan contoh ataupun hasil dari tindakan represif dari penegak hukum untuk pelaku tindak pidana narkoba di kabupaten Bantaeng, yang diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba sekaligus dijadikan pembelajaran bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan penyimpangan atau kejahatan di bidang narkoba, mengingat hukuman atau upaya represif yang diberikan oleh penegak terhadap putusan di atas.

### **3. Upaya Pembinaan**

Setelah pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* maka upaya terakhir adalah pembinaan narapidana yang dilakukan di Rutan atau Lapas, dalam hal ini Rutan Kelas IIB Bantaeng, program yang diberikan berupa pembinaan agama, pembinaan mental dan pelatihan berbagai keterampilan dengan harapan setelah menjalani masa hukuman narapidana tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali oleh masyarakat.

---

<sup>69</sup> Data Narapidana/Tahanan Tindak Pidana Khusus Pada Tahun 2017 Rutan Kelas IIB Bantaeng

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng adalah, terdiri dari faktor eksternal seperti mudahnya seseorang terpengaruh untuk melakukan kejahatan narkoba dan gaya hidup mewah dan suka bersenang-senang. Faktor eksternal berupa, pengaruh lingkungan seseorang berdomisili, rendahnya pendidikan seseorang, pengaruh ekonomi mendorong melakukan kejahatan ekonomi khususnya penjualan narkoba, serta kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah setempat.
2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng, berupa upaya preventif atau pencegahan sebelum terjadi kejahatan seperti penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan kepolisian, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan ormas Islam dan organisasi kepemudaan yang ada, serta upaya dari tokoh masyarakat. Selanjutnya upaya represif atau penindakan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana narkoba dengan memberikan hukuman berupa efek jera atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Upaya yang terakhir adalah upaya pembinaan yang dilakukan kepada narapidana narkoba.

## ***B. Implikasi Penelitian***

Memberantas kejahatan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bantaeng, bukanlah sesuatu yang mudah, untuk mencapai itu semua harus melibatkan semua elemen yang ada.

Pertama, aturan atau substansi hukum yang telah ada di jalankan sebagaimana harapan pembuat undang-undang dengan demikian diperlukan peran penegak hukum atau struktur hukum yang ada dengan lebih meningkatkan pengamanan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba. di samping itu peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum sehingga penegak hukum maksimal dalam proses kerjanya ditambah dengan profesionalisme penegak hukum

Kedua, diperlukan upaya maksimal atau perhatian maksimal dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba, selain itu mendorong media massa untuk mengampanyekan bahaya narkoba dan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan narkoba. Karena media memiliki andil yang sangat besar terhadap penyebaran informasi terkait narkoba maka diperlukan kerja sama antara pemerintah dan media untuk menekan angka kejahatan di bidang narkoba.

Ketiga, seharusnya masyarakat harus berperan aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan perilaku menyimpang dan dapat membahayakan khususnya terkait dengan kejahatan narkoba.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Alam. A.S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, Dan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* . Bandung: Replika Aditama, 2013.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1982.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bogor: 2007
- Departemen Agama RI, *Quran Tajwid*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006
- Dirdjosisworo Soedjono, *Anatomi Kejahatan Di Indonesia*, Bandung: Granesia, 1996.
- DITRESNARKOBA POLDAJATENG, P4GN (*Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika*) ,2013.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Makara, Moh Taupik dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Manheim, Herman. *Pioneers in Criminology*, Steven And Soon, 1960.
- Noach, W.M.E, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Citra Aditya Bakt, 1992.



Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta:

Esesnsi, 2010.

Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Shihab ,M Quraish , *Tafsir Al- Misbah Jilid IV*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto,Sarjoeno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS,1986

Sri, Indah Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang : Thafa Media, 2012.

Sutherland, Edwin H, *criminology*. Edisi kesepuluh. J.B. Lippincott Company. 1984.

Sutherland, Edwin H, *principles of criminology*. Philadelphia: Lippincott Sutles Gerald. 1966.

Syamsuddin, Rahman, *Merajut Hukum Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Prakoso, Arbintoro, *Kriminologi Dan Hukum Pidana, Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 Tentang. Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika.

Republik Indonesia . Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Website

Abu Azzam Hawari, 2014, *Petaka Di Balik Narkoba*, <https://kafilahtaushid.wordpress.com/petaka-di-balik-narkoba/> (diakses 8 desember 2016, 13.30 WITA).

Hasan Basri, “*Polres Bantaeng Rilis 122 Kasus*”, *Tribun Timur* 06 November 2016. <http://www.timurnews.com/polre-bantaeng-rilis-122-kasus/3543/> (diakses tanggal 16 desember 2016).

Zainal Abidin bin Asy Syaikh, *Narkoba Dalam Pandangan Islam* <http://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html/> (diakses tanggal 13 desember 2016).

### Skripsi

Jordia Putra, “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Upaya Rehabilitasinya studi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II .A*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga, 2013).

Mahyuni Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Di Kota Makassar*, Skripsi (Gowa: Fak Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2010) .

### Jurnal

Fram Raditya Yunanda Ginting’s , “*Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Jurnal Ilmiah* (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Nomor : Tahun 2016  
**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI**  
**TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Fadli A. Natsif., SH. M.H  
 2. Ashabul Kahfi., S.Ag., MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Muh. Hasan  
 N I M : 10500113109

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng".

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 16 Desember 2016

Dekan,

**Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag**

NIP. 19621016 199003 1 003

LEMBAR PENGESAHAN  
DRAFT SKRIPSI

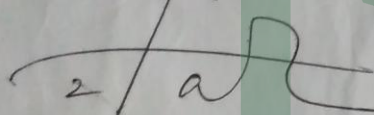
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di  
Kabupaten Bantaeng”

Disusun dan Diajukan Oleh  
**Muh Hasan**  
NIM: 10500113109

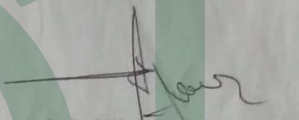
Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan  
Penulisan skripsi  
Pada tanggal : 6 Maret 2017

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I

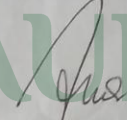
  
**Dr. Fadli Andi Natsif, SH. M.H**  
NIP. 196610162014111001

Pembimbing II

  
**Ashabul Kahfi, S.A.g., M.H**  
NIP. 197402142008011009

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

  
**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**Istiqamah, SH., M.H**  
NIP. 19610404 199303 1 005

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

  
**Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag**  
NIP. 195704141986031003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)  
 Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836*

Nomor : 978 SI 1/PP.00.9/01/2017  
 Lamp : 1 (satu) exemplar  
 Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 7 Maret 2017

Kepada  
 Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan  
 Cq. Kepala UPT P2T BKPM Pro. Sul-Sel

Di-  
 Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Muh Hasan  
 N I M : 10500113109  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Talasalapang III No 13 Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

**"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTAENG"**

Dengan dosen pembimbing:

1. DR. Fadli Andi Natsif., SH M.H
2. Ashabul Kahfi., S.Ag., M.H

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resort (POLRES) Bantaeng dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Kabupaten Bantaeng terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 s/d 10 April 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.  
 Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Wassalam  
  
 Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag  
 NIP. 19621016 199003 1 003



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 2 4 3 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 2339/S.01P/P2T/03/2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
1. Kapolsek Bantaeng  
2. Kepala Kanwil Kementerian Hukum & HAM  
Prov. Sulsel  
di-

**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : 978/SI.1/PP.00.9/01/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH. HASAN  
Nomor Pokok : 10500113109  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTAENG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Maret s/d 30 April 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 07 Maret 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
2. Pertinggal.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN**

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.102 Makassar

Telepon : 0411-854731 Faximile : 0411-871160

Email:kepegawaiankanwil Sulsel@yahoo.co.id

Nomor : W.23.UM.01.01-50  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

10 Maret 2017

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng  
di - Bantaeng

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2339/S.01P/P21/03/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Muh. Hasan  
Nomor Pokok : 10500113109  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.36 Samata

Bermaksud untuk mengadakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng untuk menyusun **Skripsi** dengan judul " **TINJAUAN KRIMONOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTAENG** ", yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret 2017 s/d 30 April 2017, sehubungan dengan hal tersebut, kiranya yang bersangkutan dapat diberikan data dan informasi dalam rangka penelitian dengan ketentuan harus mentaati segala ketentuan yang berlaku pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

**ALA UDDIN**  
**MAKASSAR**

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi  
Susilo Purwanto, SH, MH  
NIP. 19630131 198403 1 008

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar ( Sebagai Laporan);
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar ;
5. Peringgal.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANTAENG**  
Alamat : Jalan Mawar No. 9, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng  
Telp. / Fax. : (0413) 21012, Kode Pos : 92411, email : rutanbantaeng@ymail.com

#### SURAT KETERANGAN

Yang betanda tangan di bawah ini, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng menrangkan bahwa :

Nama : Muh Hasan  
Nomor Induk Mahasiswa : 10500113109  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syarifah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Alamat : Jl. Bonto Tangnga VI. Makassar.

telah melakukan penelitian pada kantor Rumah Tahanan Negara / Kelas IIB Kabupaten Bantaeng, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng"

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada peneliti tersebut di atas untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 8 April 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Bantaeng

MUHAMMAD ISHAK, A.Md.IP, SH, MH  
NIP. 19791222 200012 1 003

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR BANTAENG  
Jln. Sungai Bialo No.19 Bantaeng

**SURAT KETERANGAN**

No. Pol. : Sket / 01 / IV / 2017 / Sat Res Nkb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kepolisian Resort Bantaeng menerangkan bahwa :

Nama : MUH, HASAN,  
No Induk mahasiswa : 10500113109,  
Program studi : Ilmu hukum,  
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jensi kelamin : Laki-laki,  
Alamat : Jalan Karaeng Bonto tangnga 6 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rapoccini  
Kodya makassar.

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Kantor Polres Bantaeng dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba di kabupaten Bantaeng "

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada peneliti tersebut diatas untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Bantaeng, 10 April 2017  
Kepala Kepolisian Resort Bantaeng  
KASAT RESNARKOBA  
H. ABDURAZAK, S, Pdi  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 62040853

## PESETUJUAN PEMBIMBING

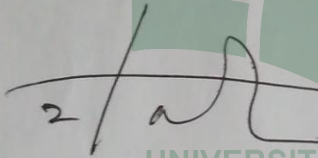
Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh Hasan**, NIM: 10500113109, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama skripsi berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Bantaeng", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

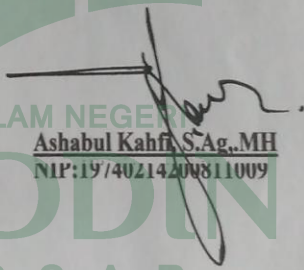
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 12 Mei 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH  
NIP: 196610162014111001

  
Ashabul Kahfi, S.Ag., MH  
NIP: 19740214200811009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor 529 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Muh. Hasan  
NIM : 10500113109  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2017  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di kab. Bantaeng"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H  
Penguji I : Dr. Marilang, M.Hum  
Penguji : Dr. H. Kasjim salenda, M.Th.I  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 19 Mei 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 529 /SI.1/PP.00.9/ 05.72017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 19 Mei 2017

Kepada

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
3. Dr. Marilang, M.Hum (Penguji I)
4. Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I (Penguji II)
5. Dr. Fadli A. Natsif, S.H, M.H (Pembimbing I)
6. Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Muh. Hasan

N I M : 10500113109

Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian

Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2017

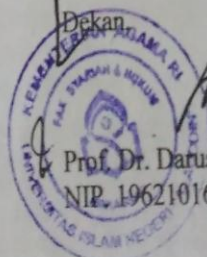
Waktu : Pukul 09.00-10.00 Wita

Tempat : Ruang 107

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Nomor : 624 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
 Nama : Muh. Hasan  
 N I M : 10500113109  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juli 2017  
 Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
 Judul : "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di Kab. Bantaeng"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut
- Ketua** : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
**Sekretaris** : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.  
**Penguji I** : Dr. Marilang, M.Hum.  
**Penguji II** : Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I.  
                   1. Mujahidah, SE  
                   2. Nurhayati Wahid

Ujian Munaqasyah/Skripsi

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
 Pada tanggal : 5 Juni 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 NIP. 19621016 199003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : 2022/SI.1/PP.00.9/ k. /2017  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 5 Juni 2017

*Hormat*

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. Abd. Halim Talhi, M.Ag. (Sekertaris)
3. Dr. Marilang, M. Hum. (Penguji I)
4. Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I. (Penguji II)
5. Dr. Fadli A. Natsif, M.H. (Pembimbing I)
6. Ashabul Kahfi, S.Ag, M. H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Muh. Hasan  
 N I M : 10500113109  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2017  
 Buka Sidang : 08.30 WITA  
 Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA  
 Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
 NIP. 19621016 199003 1 003













### RIWAYAT HIDUP



**Muh Hasan** lahir di Sulawesi Selatan, Bantaeng pada tanggal 06 Mei 1995, anak bungsu dari enam bersaudara, buah hati dari Kamaruddin Dg Situru dan ST. Bunga Hasan. Mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 20 Tala-tala Kec. Bisappu, Kab Bantaeng pada tahun 2002 sampai tahun 2007

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Bissappu, Kec. Bissappu, Kab Bantaeng pada tahun 2007 sampai tahun 2010 lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bantaeng, Kab. Bantaeng dan tamat pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah, kemudian melanjutkan ke jenjang Universitas, di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2013, lalu menyelesaikan study pada tahun 2017.

